

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah

Dian Sukma¹, Annie Mustika Putri², dan Muhammad Ahyaruddin³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau, Riau, Indonesia

¹sdian1659@gmail.com, ²annemustika@umri.ac.id, ³ahyaruddin@umri.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to analyze the effect of capital spending, size of local government, intergovernmental revenue, and local revenue on regional financial performance. The population in this study were 8 provinces on the island of Sumatera. The sample of this research is 127 regencies / cities. The sampling method in this research is purposive sampling. The data used in this study is secondary data, which is done using documentary techniques. The processing method used is multiple linear regression. Based on the research results, it can be concluded that the variables of capital expenditure, size of local government, intergovernmental revenue, local revenue have an effect on financial performance.

Keywords: *Capital Expenditure; Intergovernmental Revenue; Financial Performance*

1. Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri. Penerapan kebijakan otonomi daerah menyebabkan daerah mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah serta memiliki pengaruh pada kualitas dan ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah (Mulyani dan Wibowo, 2017).

Kemampuan mengelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya serta mampu membiayai pembangunan daerah dan pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat (Rondonuwu dkk, 2015).

Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik dan memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat hendaknya dilakukan analisis terhadap

kinerja keuangan pada pemerintah daerah. Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan informasi yang penting terutama dalam membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan untuk menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Hamid, 2018).

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa masih buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang dapat terlihat dengan adanya pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), Anwar Nasution (www.antaraneews.com, 2007). Selain itu masalah umum yang terjadi pada pengelolaan keuangan daerah adalah tidak berjalan dengan baik (www.bisnis.tempo.com, 2018). Dimana APBD yang telah dianggarkan masih mengalami defisit. APBD menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2003 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah, fungsi APBD telah ditetapkan dimana pada dasarnya APBD merupakan landasan untuk mensejahterakan

masyarakat. Namun untuk dekade ini yaitu tahun 2018 APBD yang telah dianggarkan mengalami defisit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Yang diukur melalui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera tahun 2015-2018.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan landasan teori dalam penelitian ini, teori ini membahas hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. *Principal* (dalam hal ini legislatif) mendelegasikan tanggung jawabnya termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan kepada agent (dalam hal ini eksekutif) untuk melakukan tugas tertentu berdasarkan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Pada pemerintahan peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik (Anggraeni, 2016).

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Handoyo, 2018).

Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai

analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Keputusan strategis disusun melalui kebijakan untuk mencapai sasaran dan target yang diinginkan. Pencapaian sasaran dan target membutuhkan informasi tentang aktual kinerja yang diharapkan dengan membandingkan kebijakan yang ditetapkan (*setting objectives*). Informasi yang diharapkan harus tersusun, dan merupakan desain pengukuran kinerja dan indikator yang terurai dan jelas (Hamid, 2018).

Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah (Maiyora, 2015). Hal tersebut disebabkan karena pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan atas laporan keuangannya. Ukuran yang besar dalam pemerintah daerah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam

memberi pelayanan masyarakat yang memadai (Kusumawardani, 2012).

Intergovernmental Revenue

Intergovernmental revenue (dana perimbangan) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 32 Tahun 2004).

Berkaitan *intergovernmental revenue* (dana perimbangan) dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin besar dana perimbangan maka pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat sehingga diharapkan akan membuat pemerintah daerah semakin berhati-hati dalam pelaksanaan program kerjanya. Dengan demikian, semakin besar *intergovernmental revenue* akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2013).

Berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan oleh masyarakat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Belanja modal berkaitan dengan teori keagenan yaitu dimana legislative diharapkan mengawasi pengalokasian dana

untuk meninjau pengelolaan keuangan dalam kinerja keuangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah (Anggraeni, 2016). Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dimana apabila pengalokasian anggaran dana dimanfaatkan dengan baik maka akan menghasilkan penambahan aset yang memberikan manfaat lebih dari satu periode, sehingga bisa membantu meningkatkan kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu diantaranya menurut penelitian Mulyani dan Wibowo (2017) yang didukung Handoyo (2018) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan hasil paparan diatas maka hipotesis pertama diajukan:

H1: Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera tahun 2015-2018.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan yang lebih besar pula dari publik untuk melaporkan pengungkapan wajibnya, kondisi tersebut juga terjadi pada pemerintah daerah (Achmad, 2018). Terkait dengan teori keagenan, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola aset daerah yang untuk digunakan demi kepentingan publik. Semakin besar aset yang dikelola oleh pemerintah daerah maka tentu memberikan tekanan yang lebih besar terhadap pemerintah daerah tersebut. Tekanan tersebut membuat pemerintah daerah harus meningkatkan kinerjanya. Untuk ukuran pemerintah daerah, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja pemerintah daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu diantaranya menurut penelitian Mulyani dan Wibowo (2017) yang didukung Febrinato (2018) menyatakan

bahwa Ukuran Pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan hasil paparan diatas maka hipotesis kedua diajukan:

H2: Ukuran Pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera tahun 2015-2018.

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Kaitan *Intergovernmental Revenue* dengan teori keagenan adalah pemerintah daerah mempertanggung jawabkan realisasi anggaran kepada pemerintah pusat, sehingga *Intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang mana apabila dana perimbangan yang diterima pemerintah besar maka pengawasan dari pemerintah pusat akan semakin ketat. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan semakin berhati hati dalam melaksanakan program kerjanya. Hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan karena, sumber keuangan berasal dari pihak eksternal. Dengan demikian semakin besar dana perimbangan akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu diantaranya menurut penelitian Mulyani dan Wibowo (2017) yang didukung oleh Novyandra (2016) menyatakan bahwa *Intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan hasil paparan diatas maka hipotesis ketiga diajukan :

H3: *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se Sumatera tahun 2015-2018.

Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Darwanis dan Saputra (2014) mengemukakan bahwa pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan yang bersumber dari

pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pemerintah daerah meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangannya. Berdasarkan pernyataan tersebut sesuai dengan teori keagenan bahwa dalam pengelolaan PAD, daerah dapat melihat sejauh mana pemerintah telah bertindak dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan penelitian terdahulu diantaranya menurut penelitian (Mulyani Dan Wibowo, 2017) yang didukung (Handoyo, 2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan daerah. Berdasarkan hasil paparan diatas, maka hipotesis keempat diajukan :

H4: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se Sumatera tahun 2015-2018.

Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyanim dan Wibowo (2017) menunjukkan bahwa secara simultan keseluruhan variabel yaitu Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan karena dengan banyaknya Belanja Modal maka semakin banyak pembangunan yang dilakukan serta semakin besar Ukuran Pemerintah Daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk ditambah dengan semakin besarnya Dana Perimbangan dan kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi perkembangan. Dari perkembangan pembangunan daerah tersebut akan berpengaruh kepada kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi. Berdasarkan uraian diatas sesuai dengan penelitian sebelumnya, maka

hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera tahun 2015-2018.

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data harus menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah 154 Kabupaten/Kota pada tiga Provinsi yang terdapat di pulau Sumatera, yaitu Provinsi Aceh, Riau dan Sumatera Selatan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 127 Kabupaten/Kota dari 8 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera dengan alasan karena 27 Kabupaten/Kota yang ada di 2 Provinsi yaitu Lampung dan Bengkulu tidak memenuhi kriteria dalam penelitian karena Lampung dan Bengkulu tidak mempublikasikan data jumlah penduduknya di Badan Pusat Statistik tahun 2016-2018. Kriteria yang digunakan sebagai patokan untuk menentukan sampel yaitu Realisasi APBD, dan Laporan Jumlah Penduduk pada tahun anggaran 2015-2018.

Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

Kinerja Keuangan Daerah

Adapun rasio-rasio yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut (Prmono, 2014):

1. Kemandirian

$$= \frac{\text{Total pendapatan asli daerah (PAD)}}{\text{Total belanja daerah}}$$

2. Efisiensi

$$= \frac{\text{Total Realisasi pengeluaran}}{\text{Total Realisasi penerimaan}}$$

3. Desentralisasi fiskal

$$= \frac{\text{Pendapatan asli daerah (PAD)}}{\text{Total pendapatan daerah}}$$

Jadi Kinerja Keuangan pemerintah daerah diukur dengan = Rasio kemandirian + rasio efesiensi + rasio desentralisasi fiskal.

Belanja Modal

Variabel belanja modal diukur dengan:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya.

Ukuran Pemerintah Daerah

Variabel Ukuran Pemerintah Daerah diukur dengan:

$$\text{UPD} = \frac{\text{Pendapatan (Pusat + Daerah)}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Intergovernmental Revenue

Variabel *Intergovernmental Revenue* diukur dengan:

Dana Perimbangan = DBH + DAU + DAK

Pendapatan Asli Daerah

Variabel Pendapatan Asli daerah diukur dengan rumus:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

Metode Analisis

Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda melalui program SPSS versi 20. Dalam penelitian analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera 2015-2018. Berdasarkan hal ini maka formulasi persamaan regresi linear berganda pada

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja keuangan pemerintah daerah

α = konstanta regresi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = koefisien regresi variabel bebas

X1 = Belanja Modal (BM)

X2 = Ukuran Pemerintah Daerah (UPD)

X3 = *Intergovernmental Revenue* (IR)

X4 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

e = Nilai Residu

4. Hasil dan Pembahasan

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3201	,936		3.419	,000
Belanja Modal	.181	.077	.110	2.362	,008
Ukuran	-.206	.020	-.362	-10.203	,010
IR	.430	.119	.198	3.626	,005
PAD	-.640	.046	-.638	-13.765	,000

a. Dependent Variable: Y

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Nilai koefisien Belanja Modal untuk variabel X1 sebesar 0,181 dan bertanda positif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Belanja Modal satu satuan maka akan menaikkan variabel Kinerja Keuangan (Y) naik sebesar 0,181 Satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Dilihat dari hasil yang telah dilakukan oleh peneliti dimana diperoleh nilai signifikan pada variabel belanja modal sebesar 0,019 lebih kecil dari pada signifikan yang telah ditetapkan yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera 2015-2018. Belanja Modal memiliki pengaruh

terhadap kinerja keuangan daerah dimana apabila pengalokasian anggaran dana dimanfaatkan dengan baik maka akan menghasilkan penambahan aset yang memberikan manfaat lebih dari satu periode, sehingga bisa membantu meningkatkan kinerja keuangan. Dengan meningkatnya belanja modal maka akan menciptakan pendapatan di berbagai macam sektor dan produktivitas masyarakat semakin tinggi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan Wibowo (2017) mengatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Nilai koefisien ukuran pemerintah daerah untuk variabel X2 sebesar -0,206 dan bertanda negatif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap penurunan ukuran pemerintah daerah satu satuan maka akan menaikkan variabel Kinerja Keuangan (Y) naik sebesar 0,206 Satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Nilai signifikansi pada variabel ukuran pemerintah daerah adalah 0,00 dengan demikian nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera 2015-2018. Pada Ukuran Pemerintah Daerah, terkait dengan teori keagenan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola asset daerah yang untuk digunakan demi kepentingan publik. Semakin besar asset yang dikelola oleh pemerintah daerah maka tentu memberikan tekanan yang lebih besar terhadap pemerintah daerah tersebut. Tekanan tersebut membuat pemerintah daerah harus meningkatkan kinerjanya. Untuk ukuran pemerintah daerah semakin besar ukuran pemerintah daerah maka akan semakin baik kinerja keuangan pada

pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera 2015-2018. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan Wibowo (2015) mengatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan

Nilai koefisien *Intergovernmental Revenue* untuk variabel X3 sebesar 0,430 dan bertanda positif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan *Intergovernmental Revenue* satu satuan maka akan menaikkan variabel Kinerja Keuangan (Y) naik sebesar 0,430 Satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Nilai signifikansi pada variabel *Intergovernmental Revenue* adalah 0,00 dengan demikian nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel *Intergovernmental Revenue* (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera tahun 2015-2018. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novyandra (2016) mengatakan bahwa *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan karena apabila *Intergovernmental revenue* tinggi maka akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan, karena keuangan berasal dari pihak eksternal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah untuk variabel X4 sebesar -0,640 dan bertanda negatif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap penurunan satu satuan maka akan menaikkan variabel Kinerja Keuangan (Y) naik sebesar -0,640 Satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Nilai signifikansi pada variabel Pendapatan Asli Daerah adalah 0,000 dengan demikian

nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X4) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pemerintah daerah meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handoyo (2018) mengatakan bahwa PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam membiayai pembiayaan pembangunan daerah yang diimpilkasikan pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Dari hasil pengujian simultan (uji F), diperoleh nilai signifikan variabel sebesar 0,000 lebih kecil dari pada signifikan yang telah ditetapkan yaitu 0,05. Dapat disimpulkan Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama atau simultan memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan. Dalam meningkatkan Kinerja Keuangan suatu daerah pemerintah daerah perlu meningkatkan sumber keuangan suatu daerah agar berjalannya sistem pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah dalam meningkatkan sumber keuangan suatu daerah yaitu Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan Pendapatan Asli Daerah

memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan Wibowo (2017) yang menyatakan bahwa secara bersamaan atau simultan variabel Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian mengenai Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Belanja Modal berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya Belanja Modal, maka juga akan meningkatkan kinerja keuangan.
- 2) Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah. Apabila ukuran pemerintah daerah besar maka akan meningkatkan kinerja keuangan pada pemerintah daerah.
- 3) *Intergovernmental Revenue* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat maka akan semakin besar juga kinerja pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.
- 4) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
- 5) Faktor belanja modal, ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* dan pendapatan asli daerah

berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan.

Keterbatasan

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel dalam mempengaruhi kinerja keuangan, yaitu Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Asli Daerah sedangkan masih banyak faktor keuangan atau non keuangan lainnya yang dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan agar dapat meningkatkan hasil yang lebih signifikan.
- 2) Data yang digunakan hanya data sekunder dari data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dengan time series 4 tahun, yaitu tahun 2015-2018.
- 3) Peneliti hanya menggunakan rasio kemandirian, efisiensi, dan desentralisasi fiskal.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel lain salah satunya seperti variabel pertumbuhan ekonomi, karena untuk mengukur keberhasilan kinerja keuangan atau kemampuan dalam melaksanakan pengelolaan kinerja keuangan, pemerintah daerah perlu memperhatikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah apakah pertumbuhan suatu daerah tersebut meningkat atau menurun sehingga bisa dinilai kinerja keuangan daerah tersebut. Serta diharapkan dapat menambah rentang waktu dan periode yang lebih panjang. Dan menambah rasio efektifitas atau rasio lainnya, agar pemerintah daerah lebih bisa mengukur persentase kinerja keuangannya dengan cara yang lain agar lebih efektif dalam mengelola keuangan daerah untuk mencapai pelayanan publik.

Referensi

- Achmad, A. 2017. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Dan Hasil Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lampung 2011-2015.
- Anggraeni, A. 2016. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Setiap Kabupaten Dan Kota Di Provinsi DI Yogyakarta). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Febrianto, N. 2018. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Ukuran Legislatif, Dan *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah".
- Ghozali, I. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBS SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. dan Kusufi, M. S. 2016. Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamid, A. A. 2018. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka-Jawa Barat. Vol.1, No. 4, 2018.
- Handoyo, E. T. 2018. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue* Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2014-2016).
- Kusumawardani. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES. ISSN 2252-6765.
- Maiyora. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Study Empiris Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera). Faculty Of Economics Riau University. Pekanbaru. JOM FEKON. Vol. 2. No. 2.
- Mulyani, S., dan Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 15(1), 57–66.
- Novyindra, R. 2016. Pengaruh Belanja Modal, *Intergovernmental Revenue*, *Leverage*, Size, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Di Pulau Jawa 2014.
- Rondonuwu, R.H., Jantje, J. T., dan Budiarso, N. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA, 3 (4), hal. 23-32.
- www.antaraneews.com, 2007
- www.bisnis.tempo.com, 2018